

## **IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS HUNIAN PADA PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI KOTA SEMARANG**

### ***Implementation of Gender Mainstreaming in Improving the Quality of Shelter in the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) in Semarang City***

**Landung Esariti, Fitri Fauziah, Artiningsih**

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH Tembalang, Semarang 50275

Surel: landungesariti@lecturer.undip.ac.id, fitrifauziah@alumni.undip.ac.id,

artiningsih@lecturer.undip.ac.id

Diterima : 04 Juni 2020;

Disetujui : 30 Oktober 2020

#### **Abstrak**

Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu mewujudkan kota-kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkeadilan. Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut, maka tujuan studi ini melihat sejauh mana implementasi strategi pengarusutamaan gender yang meliputi akses, manfaat, kontrol, dan partisipasi yang setara antara perempuan dan laki-laki dilakukan dalam kegiatan peningkatan kualitas hunian program BSPS. Hal ini penting, mengingat kualitas rumah layak huni merupakan salah satu indikator dari pengurangan kemiskinan perkotaan. Analisis menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik skoring dan pembobotan, melalui penyebaran kuesioner pada 33 rumah tangga penerima bantuan di Kecamatan Semarang Utara, Semarang. Validasi terhadap upaya peningkatan kualitas hunian dilakukan melalui observasi terhadap kondisi fisik masing-masing rumah, sebelum dan sesudah menerima bantuan. Hasil studi menunjukkan dua aspek yang unggul secara nilai yaitu manfaat sebesar 74,74 dan kontrol sebesar 67,17. Walaupun demikian, aspek kontrol memiliki pengaruh yang kuat pada rumah tangga penerima bantuan yaitu meningkatnya kapasitas individu. Hasil analisis penerapan program BSPS merekomendasikan bahwa strategi pengarusutamaan gender berhasil diterapkan pada beberapa aspek, khususnya peningkatan pada aspek akses dan partisipasi. Output studi juga menunjukkan adanya peran penting fasilitator lapangan untuk mempercepat proses peningkatan kapasitas individu..

**Kata Kunci:** Pengarusutamaan gender, renovasi rumah, program BSPS, manfaat dan kontrol, kemiskinan perkotaan

#### **Abstract**

One of the goals of sustainable development is to create cities and settlements that are inclusive, safe, resilient and fair. In an effort to achieve these goals, the objective of this study looks at to which extent the implementation of a gender mainstreaming strategy that includes access, benefits, control, and participation is conducted in the improvement of the housing quality of the BSPS program. This is important, considering the quality of livable homes is one indicator of urban poverty reduction. The analysis uses a quantitative approach, with scoring and weighting techniques, via the distribution of questionnaires to 33 beneficiary households in the District of North Semarang, Semarang. Validation of efforts to improve housing quality was conducted by observing the before and after physical condition of each beneficiary's house. The results of the study showed two aspects that were superior in value: a benefit of 74.74 and control of 67.17. However, the control aspect has a strong influence on beneficiary households, that is to increase individual capacity. The results of the analysis of the application of the BSPS program stated that the gender mainstreaming strategy was successfully applied to several aspects, particularly the improvement in access and participation aspects. The study output also shows the important role of field facilitators to accelerate the process of increasing individual capacity.

**Keywords :** Gender mainstreaming, housing improvement, BSPS program, benefit and control, urban poverty

## PENDAHULUAN

Agenda pembangunan berkelanjutan membawa dampak terhadap kewajiban pemenuhan kebutuhan pengelolaan kota yang efektif. Ini mengisyaratkan perlunya integrasi antara upaya pengentasan kemiskinan yang membahas keadilan sosial, ekonomi, partisipasi dan peningkatan kualitas lingkungan (Rahman 2016). Perumahan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberlanjutan karena kualitas rumah layak huni menjadi indikator keberhasilan strategi pengentasan kemiskinan. Rumah tidak layak huni menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, merupakan hunian yang tidak memenuhi syarat keselamatan bangunan, kecukupan luas bangunan, dan kesehatan penghuni (Permen PUPR 2016). Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni yaitu melalui pencapaian tujuan ke sebelas dari *Sustainable Development Goals* (SDGs), yakni mewujudkan kota-kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Pencapaian tujuan SDGs dilakukan melalui pengambilan keputusan yang inklusif dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Menurut Zuckerman (2002) konsep kesetaraan gender mengacu pada hal, peluang, dan kewajiban yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dan mendapat manfaat dari penyelenggaraan pembangunan. Pernyataan tersebut didukung dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 bahwa pembangunan perlu memperhatikan aspek gender pada perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan (Inpres 2000). Perbedaan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki dalam penyediaan perumahan mendorong perlunya masalah gender terintegrasi dengan program kebijakan pembangunan (Asian Development Bank 2000), mengingat perlunya diberikan partisipasi dan kesempatan yang sama dalam upaya peningkatan kualitas hunian. Sementara kesetaraan gender di Indonesia masih menjadi tantangan nasional yang perlu diakomodir dalam kebijakan pembangunan nasional melalui strategi pengarusutamaan gender. Tujuannya agar penyelenggaraan kebijakan pembangunan dapat menjangkau seluruh golongan dan masyarakat mendapatkan manfaat yang sama dari adanya pembangunan.

Rumah swadaya di Indonesia menjadi salah satu solusi yang dianggap efektif efektif (Tunas dan Peresthu 2010). Dengan mempertahankan lokasi rumah eksisting berarti menjamin penghidupan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap, karena adanya jaminan aktivitas produktif rumah

tangga terkait kegiatan mencari penghasilan tetap berjalan. Yang menjadi perhatian berikutnya bagi MBR adalah upaya secara perlahan dan bertahap untuk memperbaiki kondisi fisik hunian dengan dana swadaya, sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas hidup. Pemerintah telah memberikan fasilitasi dengan adanya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini bertujuan memberikan hibah dana stimulan untuk meningkatkan kondisi fisik sebagian rumah MBR. Hal ini juga sesuai dengan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) yang disusun pada tahun 2012, yang bertujuan untuk mengurangi kantong-kantong permukiman kumuh di kota-kota besar Indonesia, termasuk Kota Semarang.

Menurut Bappenas (2012) pembangunan yang responsif gender dilakukan dengan mempertimbangkan strategi pengarusutamaan gender antara lain akses, manfaat, kontrol dan partisipasi. Penelitian terdahulu yang dilakukan Zulkarnain (2016) menyebutkan bahwa permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yaitu kurangnya komunikasi yang dilakukan antara tim teknis dengan penerima bantuan sehingga terdapat kesulitan dalam mengartikan tujuan dari kebijakan tersebut. Masalah pada akses dan partisipasi penerima bantuan juga menimbulkan kerugian khususnya yang berkaitan dengan ketidaksesuaian antara harga bahan bangunan dan rencana anggaran biaya (RAB). Ditambah dengan penelitian dari Suhaeti (2006) merekomendasikan perlunya mengintegrasikan gender, dalam arti mengakui keterlibatan dan kontribusi perempuan dalam sektor domestik. Jika dilihat dari alokasi waktu yang dicurahkan, kondisi laki-laki lebih baik dengan waktu senggang lebih banyak. Sedangkan penelitian dari Esariti, Haulah, dan Sunarti (2019) menyimpulkan bahwa strategi pengarusutamaan gender juga menjamin efektifitas tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga keberlanjutan peningkatan kualitas hunian untuk seluruh MBR secara bertahap dapat diukur capaiannya. Sebagai kesimpulan, beberapa penelitian yang terdahulu menekankan pada aspek yang menjadi penyebab mengapa program kegiatan BSPS menjadi tidak efektif, sedangkan artikel ini akan fokus pada pembahasan mengenai keberhasilan penerapan pengarusutamaan gender pada pelaksanaan program BSPS di Kota Semarang.

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa permasalahan utama ada pada belum diintegrasikannya pengarusutamaan gender dalam program BSPS. Data dari penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa tidak diakuinya perbedaan

kebutuhan untuk berpartisipasi dan mendapat kesempatan yang sama untuk menerima manfaat program pembangunan menjadi salah satu indikator kurang efektifnya BSPS. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk membahas sejauh mana implementasi pengarusutamaan gender dalam peningkatan kualitas hunian program BSPS di Kecamatan Semarang Utara melalui empat aspek utama pengarusutamaan gender yaitu akses, manfaat, kontrol, dan partisipasi.

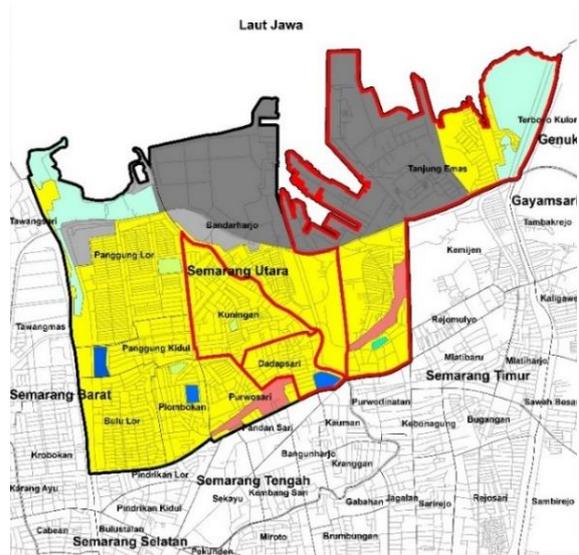
Strategi pengarusutamaan gender merupakan keharusan dalam kebijakan pembangunan perumahan untuk menjamin terakomodirnya perbedaan kebutuhan dan meratanya manfaat yang didapatkan seluruh penerima bantuan dari adanya kegiatan peningkatan kualitas hunian (Bradshaw et al. 2017; Meier dan Lombardo 2013).

Hal ini menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana program BSPS menerapkan perencanaan terkait gender dalam pelaksanaannya yang mengakomodir aspirasi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Pokok pembahasan dalam artikel ini meliputi: (1) latar belakang dilakukannya penelitian; (2) hasil kajian literatur, metode penelitian, ruang lingkup dan data untuk analisis; (3) hasil pembahasan dari analisis implementasi strategi pengarusutamaan gender; (4) kesimpulan dan rekomendasi hasil penelitian.

**METODE**

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 33 rumah tangga penerima bantuan program BSPS di Kecamatan Semarang Utara. Lokasi penelitian spesifik pada 3 kelurahan diantaranya Kelurahan Tanjungmas, Kelurahan Kuningan, dan Kelurahan Dadapsari, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Pemilihan 3 kelurahan ini dengan pertimbangan dapat mewakili secara karakteristik dan untuk Kelurahan Dadapsari memiliki jumlah penerima bantuan terbanyak di Kecamatan Semarang Utara tahun 2019. Sementara itu untuk jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 110 KK penerima bantuan pada tahun 2019 yang kemudian diambil *sample* sebanyak 30% dari jumlah populasi.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis skoring dan pembobotan pada variabel yang ditentukan melalui kajian pustaka. Pembobotan dilakukan dengan menghitung skor pada masing-masing kriteria yang kemudian hasilnya dibobotkan menggunakan nilai indeks. Teknik analisis skoring dalam penelitian ini menggunakan skala likert positif sebanyak 3 dengan interval skor



**Gambar 1** Lokasi Penelitian di Kecamatan Semarang Utara  
 Sumber: Bappeda Kota Semarang – 2016

sebesar 33% (Mussardo 2019). Perhitungan skoring memiliki rincian dengan persamaan (1) dan (2)

$$Skor\ ideal = Nilai\ skala \times Jumlah\ responden.....(1)$$

$$Hasil = \frac{(Skor \times Responden)}{(Jumlah\ Skor\ Ideal)} \times 100\% .....(2)$$

Variabel penelitian berupa aspek akses, manfaat, kontrol, dan partisipasi tersebut disusun ke dalam rubrik penilaian yang terdiri dari beberapa kriteria pada masing-masing aspek gender. Kriteria tersebut yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penerapan dari empat aspek gender yaitu akses, manfaat, kontrol, dan partisipasi pada program BSPS. Aspek yang mejadi variabel penelitian dapat dilihat pada tabel Tabel 1.

**Tabel 1** Kriteria Penelitian

Aspek	Kriteria
Akses	Peluang memberikan gagasan terkait pengambilan keputusan
	Keikutsertaan dalam kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah
Manfaat	Mendapatkan manfaat sosial dari program BSPS
	Mengambil keputusan terhadap penggunaan uang
Kontrol	Mengambil keputusan terhadap bagian rumah yang diperbaiki
	Ikut serta dalam menyebarkan informasi
Partisipasi	Kemudahan kelompok penerima bantuan dalam memperoleh informasi
	Mampu melaksanakan kegiatan secara mandiri

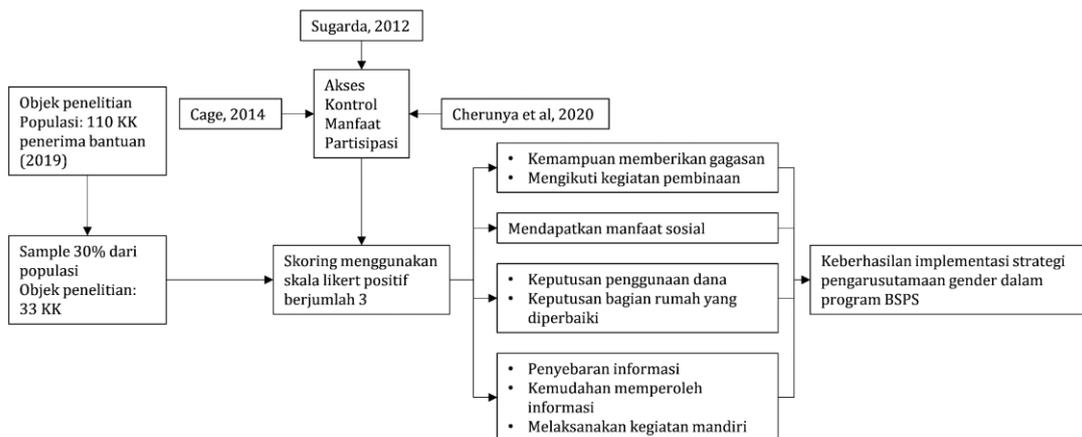
Hasil skor likert divalidasi lagi secara triangulasi dengan melakukan kegiatan observasi lapangan. Terdapat form *checklist* untuk mengidentifikasi bagian rumah yang secara fisik mengalami peningkatan kualitas. Observasi dilakukan terdapa 33 rumah tangga yang menjadi responden penelitian.

Peningkatan kualitas hidup untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan salah satunya dengan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik (Burns, Keswell, dan Leibbrandt 2005). Hal ini diterapkan dengan adanya upaya pengambilan keputusan yang inklusif yaitu melalui keterlibatan masyarakat terutama kaum marjinal dan masyarakat miskin. Pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan perlu mengatasi beberapa hambatan dalam pembangunan salah satunya menghadapi konflik yang muncul dalam pengambilan keputusan terkait bagaimana meningkatkan, membangun kembali, atau merubuhkan permukiman kumuh (Belsky 2012). Pembangunan yang inklusif dilakukan dengan melibatkan langsung masyarakat dalam seluruh kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi hambatan terkait peningkatan kualitas hunian di permukiman kumuh. Menurut Jiboye (2011) permukiman kumuh dengan kondisi rumah tidak layak huni muncul akibat ledakan populasi di perkotaan sebagai dampak dari kemiskinan. Peningkatan kualitas hidup untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan salahsatunya dengan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik (Burns, Keswell, dan Leibbrandt 2005). Hal ini diterapkan dengan adanya upaya pengambilan keputusan yang inklusif yaitu melalui keterlibatan masyarakat terutama kaum marjinal dan masyarakat miskin. Pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan perlu mengatasi beberapa hambatan dalam pembangunan salah satunya menghadapi konflik yang muncul dalam pengambilan keputusan terkait bagaimana

meningkatkan, membangun kembali, atau merubuhkan permukiman kumuh (Belsky 2012). Oleh sebab itu, perlu dibukanya akses bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses kegiatan pembangunan dalam hal ini yaitu peningkatan kualitas hunian program BSPS. Tujuan dilibatkannya masyarakat adalah agar hasil dari kegiatan pembangunan ini sesuai mengatasi masalah yang sebenarnya dihadapi oleh masyarakat.

Kemiskinan lebih banyak terjadi pada rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan (Siddique 1998). Hal ini disebabkan dari rendahnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan khususnya yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Kondisi ini juga didukung oleh oleh (Zuckerman 2002) yang mengemukakan bahwa beban kemiskinan yang dialami oleh perempuan dan laki-laki itu berbeda, dan ini berpengaruh pada perbedaan intervensi pembangunan. Perbedaan ini yang kemudian mendorong pentingnya sebuah pertimbangan dalam menyusun prioritas kebijakan pembangunan khususnya untuk pengentasan kemiskinan. Menurut Chen, Vanek, dan Carr (2004) kesetaraan gender merupakan bagian yang perlu diperhatikan dalam pengentasan kemiskinan yaitu dari kontribusi yang diberikan oleh kaum miskin baik laki-laki dan perempuan.

Selama ini kebijakan pembangunan yang diselenggarakan belum membuka peluang khususnya bagi masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kota, sehingga potensi mereka tidak dianggap berarti (Cage 2014). Oleh sebab itu, partisipasi menjadi salah satu peluang masyarakat miskin untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan dan juga menjadi tolak ukur keberhasilan program pembangunan tersebut. Menurut Cherunya et al. (2020) adanya partisipasi masyarakat dalam proses



Gambar 2 Diagram Alur Penelitian

pembangunan dapat meningkatkan pemahaman mengenai apa yang masyarakat inginkan, membantu dalam menyusun prioritas, dan meningkatkan komitmen terhadap kegiatan yang berlangsung. Tidak hanya itu, Moser (2017) peningkatan kualitas rumah akan mendorong pemberdayaan. Ini karena rumah berfungsi sebagai aset yang mendorong pengembangan keluarga, faktor krusial yang memicu aktivitas produktif keluarga untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Salah satunya melalui partisipasi dalam kegiatan lingkungan sehingga jaringan yang kuat akan membuka akses pada informasi terkait program pemerintah yang bermanfaat untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Keterlibatan tersebut yang akan diukur dalam studi ini, menggunakan aspek gender pada penyelenggaraan program peningkatan kualitas hunian.

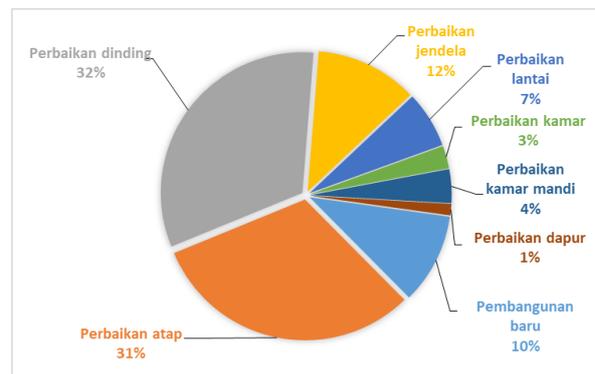
Isu gender dalam kebijakan pembangunan menurut Sugarda (2012) dapat dilihat pada empat aspek gender yakni akses, manfaat, kontrol, dan partisipasi. Masing-masing aspek makna data yang dapat digunakan untuk menganalisis diantaranya: (1) **Akses**, merupakan data mengenai peluang dalam memanfaatkan sumberdaya mencakup alam, manusia, keuangan, dan pelayanan; (2) **Manfaat**, adalah sebuah data yang menunjukkan manfaat yang dirasakan dari hasil pembangunan baik langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat; (3) **Kontrol**, menunjukkan kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu; (4) **Partisipasi**, adalah data yang menunjukkan pengetahuan, sikap, maupun praktik masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Deskripsi tersebut menjadi salah satu landasan dalam penyusunan kriteria bagi masing-masing aspek gender. Untuk lebih jelasnya, detail kegiatan analisis dapat dilihat pada Gambar 2.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pemanfaatan Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Semarang Utara

Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Semarang pada tahun 2019 dengan jenis kegiatan yaitu peningkatan kualitas rumah swadaya. Alokasi dana stimulan untuk setiap satu rumah tangga penerima bantuan sebesar Rp17.500.000 yang dibagi menjadi dana material bangunan dan upah tenaga kerja masing-masing sebesar Rp15.000.000 dan Rp2.500.000. Bentuk perbaikan yang dilakukan juga tergantung pada besar kecilnya dana swadaya yang dimiliki masing-masing rumah tangga penerima bantuan.

Peningkatan kualitas rumah yang dilakukan oleh penerima bantuan umumnya pada bagian atap, dinding, lantai, dan jendela. Beberapa penerima bantuan juga melakukan perbaikan pada ruang tertentu seperti kamar mandi, dapur, dan kamar tidur. Kondisi rumah yang rusak umumnya diakibatkan oleh usia bangunan lebih dari 20 tahun, dan adanya peristiwa rob di Kecamatan Semarang Utara. Perbaikan pada atap yang bocor dengan mengganti struktur penahan dan juga mengganti atap. Umumnya penerima bantuan memilih atap asbes dengan pertimbangan harga yang lebih terjangkau. Pemilihan bahan ini justru berbeda dengan yang dinyatakan Moksnes dan Melin (2014) bahwa peningkatan kualitas fisik hunian di permukiman kumuh perlu memperhatikan jenis bahan bangunan yang digunakan. Hal ini berpengaruh pada keamanan rumah terutama kondisi permukiman kumuh yang cenderung memiliki kepadatan yang tinggi. Dinding rumah yang mengalami kerapuhan dilakukan dengan mengganti secara keseluruhan dengan batu bata baru. Pemilihan batu bata untuk dinding juga beragam yaitu dengan batu bata merah atau ada yang menggunakan batako. Lantai yang sebelumnya masih berupa tanah, setelah perbaikan umumnya ditutup menggunakan campuran semen. Perbaikan jendela dilakukan secara beragam dengan menambah jumlah jendela, mengubah posisi jendela, dan mengganti dengan kayu baru. Beberapa penerima bantuan juga memilih untuk menambah jumlah pintu dan ventilasi yang sebelumnya tidak ada pada rumah tersebut.



Gambar 3 Bentuk Perbaikan Rumah

Validasi terhadap peningkatan kondisi fisik masing-masing dilakukan melalui observasi lapangan dan mengkonfirmasi kegiatan yang dilakukan sebelum dan sesudah mendapatkan dana hibah BSPS. Selama melakukan observasi dalam jangka waktu 1 bulan, diidentifikasi bahwa detail bentuk perbaikan rumah seperti yang diinformasikan pada Gambar 3 dan Gambar 4. Sesuai dengan yang disebutkan oleh Parsell (2012) rumah yang ideal adalah rumah sebagai tempat tumbuh kembang keluarga. Rumah yang baik dan memenuhi standar kesehatan dan

keamanan menjamin penghidupan anggota keluarga yang tinggal di dalamnya. Ini juga dikuatkan oleh pendapat dari Tan (2012) bahwa lingkungan yang



**Gambar 4.** Bentuk Perbaikan pada Dinding, Atap, Lantai, Dan Pintu

baik juga mempunyai peran penting dalam pencapaian kualitas hidup keluarga. Sehingga hasil observasi menyimpulkan bahwa dana hibah BSPS bermanfaat bagi penerima bantuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, yang secara tidak langsung mengantarkan keluarga tersebut meningkatkan kondisi kemiskinannya.

### **Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Kegiatan BSPS**

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan program yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR sebagai bentuk pengentasan kemiskinan melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni. Program BSPS dilaksanakan di Kota Semarang pertama kali pada tahun 2019. Berdasarkan data Satuan Kerja Non Vertikal Terpadu (SNVT) salah satu kecamatan yang menjadi tempat pelaksanaan tersebut yaitu Kecamatan Semarang Utara. Penyelenggaraan program BSPS dibagi menjadi tiga jenis kegiatan utama yaitu peningkatan kualitas, pembangunan baru, dan pembangunan prasarana, sarana dan

utilitas umum. Selain jenis kegiatan, pelaksanaan program BSPS juga dilakukan melalui tahapan pendampingan yang melibatkan masyarakat serta tim teknis. Tahapan pendampingan memiliki alur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, hingga pengembangan mandiri pasca kegiatan. Tujuan dari adanya kegiatan pendampingan yaitu masyarakat dapat mempersiapkan diri selama berlangsungnya program.

Integrasi gender menurut menurut Caro et al. (2009) dan Suhaeti (2006) adalah sebuah strategi yang diterapkan dalam perencanaan program, penilaian, desain, implementasi dan pengawasan serta evaluasi untuk mempertimbangkan norma-norma terkait gender. Perbedaan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki dalam penyediaan perumahan yang mendorong perlunya gender terintegrasi dalam program kebijakan pembangunan tersebut (Asian Development Bank 2000). Perbedaan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki dalam penelitian ini kaitannya dengan penyediaan perumahan. Penyelenggaraan program BSPS sebagai upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas hidup salah satunya dengan melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sasaran utama program tersebut yaitu permukiman informal dengan kondisi rumah tidak layak huni karena tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan bangunan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Moksnes dan Melin (2014) bahwa pendekatan baru dalam pembangunan kota dilakukan dengan perencanaan bersama, pembiayaan dan implementasi peningkatan kualitas hunian yang dilakukan dengan melibatkan penduduk permukiman informal.

### **Akses**

Kebijakan pembangunan dalam konteks pengentasan kemiskinan harus memperhatikan kesetaraan gender terutama dalam pemberian akses pada perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (Zuckerman 2002). Sejalan dengan pernyataan tersebut, program BSPS dalam pelaksanaannya memberikan akses pada perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendampingan. Akses ini kemudian dianalisis berdasarkan dua kriteria yaitu kemampuan dalam memberikan gagasan dan keikutsertaan dalam kegiatan pembinaan (Puspitawati 2013).

Kriteria pertama pada aspek akses yaitu kemampuan memberikan gagasan terkait pengambilan keputusan, menunjukkan bahwa rumah tangga penerima bantuan memberikan gagasan atau ide dalam menentukan bagian dari rumah yang perlu diperbaiki. Selain itu, rumah tangga penerima bantuan tidak mengelola penggunaan dana.

Pengelolaan dana diserahkan kepada tenaga fasilitator lapangan dengan memberikan kesempatan pada penerima bantuan untuk memilih alternatif pembiayaan.

Kriteria kedua akses adanya keikutsertaan penerima bantuan dalam kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah/tim teknis mengkonfirmasi bahwa penerima bantuan wajib mengikuti kegiatan pendampingan kecuali bagi mereka yang kondisinya tidak memungkinkan untuk hadir, seperti lansia. Kriteria ini berhasil terpenuhi karena adanya aturan wajib tersebut.

### **Manfaat**

Pemberdayaan menurut Narayan (2006) merupakan titik awal yang bermanfaat untuk pekerjaan lebih lanjut seperti pengelolaan sumberdaya, pelatihan keterampilan, kepemimpinan, proses demokrasi, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Manfaat tersebut dianalisis dari perubahan yang dirasakan oleh penerima bantuan secara individu maupun terhadap lingkungannya. Aspek manfaat memiliki satu kriteria yaitu penerima bantuan mendapatkan manfaat dari terlaksananya program BSPS secara individu. Hasil penelitian membuktikan manfaat yang didapatkan oleh penerima bantuan secara individu yaitu meningkatnya relasi dan lebih aktif dalam kegiatan lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya proses peningkatan kapasitas dari individu dan perannya di dalam lingkungan rumah.

Czischke (2018) menyebutkan bahwa perubahan yang dirasakan juga dipengaruhi oleh kemampuan fasilitator untuk memahami variasi kondisi eksisting penerima bantuan. Hal ini akan menentukan bagaimana masyarakat berpenghasilan rendah menemukenali analisis kebutuhan (*need assessment*). Manfaat lain dari kegiatan pendampingan adalah terciptanya hubungan saling menguntungkan antara penerima bantuan dan fasilitator. Proses komunikasi, menjalin *networking*, memahami aturan bersama merupakan modal sosial yang penting dalam proses pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah (Babaei, Ahmad, dan Gill 2012).

### **Kontrol**

Kontrol dinilai dari kemampuan seseorang atau masyarakat untuk mengambil keputusan guna melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu (Sugarda 2012). Hal ini juga didukung oleh pernyataan (Zuckerman 2002) terkait tidak adanya kekuatan yang dimiliki oleh perempuan untuk mengalokasikan sumberdaya dan keputusan investasi di rumah, komunitas, dan negara.

Aspek kontrol dibagi menjadi dua kriteria diantaranya kemampuan mengambil keputusan terhadap penggunaan dana dan kemampuan mengambil keputusan terhadap bagian rumah yang diperbaiki. Keputusan terhadap penggunaan dana tidak langsung dari penerima bantuan, melainkan dikelola oleh tenaga fasilitator dengan alur yakni penerima bantuan memberikan daftar kebutuhan material bangunan yang kemudian dana tersebut akan dibayarkan pada toko bahan bangunan tertuju. Keputusan terhadap bagian rumah yang diperbaiki mampu dilakukan oleh penerima bantuan, karena keputusan tersebut umumnya merupakan hasil keputusan pribadi maupun diskusi dengan pasangan atau anggota keluarga lain. Kontrol terhadap keputusan yang disepakati merupakan bukti tercapainya pemberdayaan (Narayan 2005), ini menjelaskan bahwa penerima bantuan mampu berperan sebagai agen perubahan (Ibrahim dan Alkire 2007). Pemberdayaan yang dilakukan di level individu akan mendorong terjadinya diskusi dan penyampaian ide pemikiran serta berperan serta aktif untuk mencapai perubahan yang diharapkan.

### **Partisipasi**

Partisipasi dalam proses pembangunan dapat meningkatkan pemahaman tentang apa yang sebenarnya diinginkan, membantu dalam menyusun prioritas dan meningkatkan komitmen untuk perbaikan yang dilakukan. Fenster (1993) menyatakan bahwa partisipasi dapat diukur pencapaiannya dengan empat tingkatan intensitas pencapaian yaitu berbagi informasi, konsultasi, pengambilan keputusan, dan tindakan inisiasi. Partisipasi dalam program BSPS dianalisis menggunakan tiga kriteria diantaranya ikut serta dalam menyebarkan informasi, kemudahan dalam memperoleh informasi, mampu melaksanakan kegiatan secara mandiri.

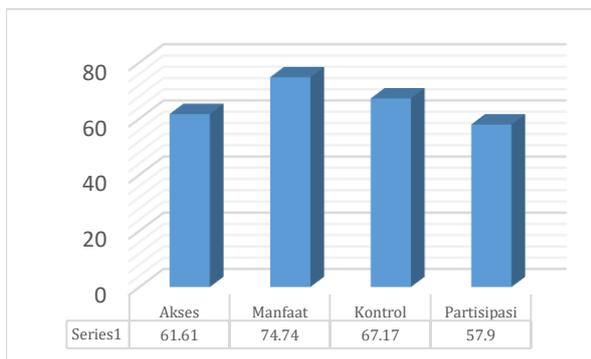
Kriteria pertama, rumah tangga penerima bantuan menyatakan bahwa mereka tidak ikut menyebarkan informasi, karena tidak memahami sepenuhnya mengenai program yang sedang berjalan. Hasil kriteria kedua menunjukkan bahwa informasi diperoleh langsung dari pengumuman resmi pihak kelurahan sebagai tim teknis. Kriteria terakhir, pelaksanaan kegiatan tidak dilakukan secara mandiri akibat banyaknya penerima bantuan yang tidak mampu melaksanakan secara mandiri sehingga perlu bantuan tenaga fasilitator lapangan.

(Bardhan et al 2019) menjabarkan partisipasi akan menentukan keberhasilan program apabila pendekatannya tepat. Berdasarkan contoh aplikasi pada program peningkatan kualitas permukiman kumuh di Mumbai, India penggunaan strategi dengan bahasa anjuran (*sentiment analysis*) yang positif,

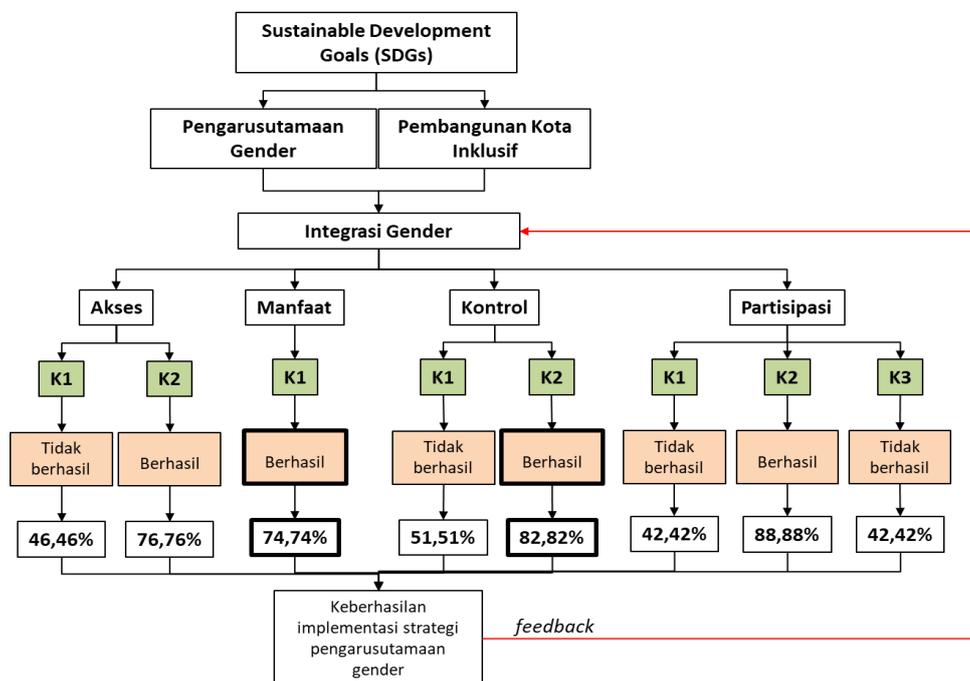
terbukti menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan sampai dengan 60%. Selain dengan metode tersebut, cara meningkatkan partisipasi bisa dilakukan dengan mendorong kontribusi MBR sesuai kemampuan (Gwaleba dan Masum 2018). Partisipasi menjamin fleksibilitas memilih kontribusi dalam bentuk dukungan dana, tenaga dan informasi sehingga mendorong kepemilikan bersama agar tercapai lingkungan permukiman yang lebih baik. Diagram implementasi gender menjelaskan dasar pentingnya strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan kota hingga contoh keberhasilan penerapan strategi tersebut dalam program peningkatan kualitas hunian di Indonesia. Implementasi strategi pengarusutamaan gender dalam program BSPS dinilai menggunakan empat aspek yakni akses, manfaat, kontrol, dan partisipasi. Empat aspek ini yang kemudian dianalisis

menggunakan perhitungan skoring yang kemudian hasilnya dibobotkan berdasarkan jumlah kriteria pada Tabel 1. Hasil yang ditunjukkan dari penilaian skoring dan pembobotan berupa persentase yang menunjukkan berhasil atau tidak berhasilnya penerapan strategi pengarusutamaan gender dalam program BSPS. Terdapat 4 dari 8 kriteria dengan hasil skoring dan pembobotan yang unggul dan berhasil diterapkan dalam upaya peningkatan kualitas hunian.

Berdasarkan uraian analisis di atas dan hasil pembobotan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5, menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya, program BSPS sudah menerapkan beberapa aspek gender dengan baik. Aspek gender yang secara berhasil diterapkan pada penyelenggaraan program BSPS yaitu pada aspek manfaat dan kontrol rumah tangga penerima bantuan. Unggulnya nilai manfaat yang didapatkan karena penerima bantuan umumnya merasakan manfaat yaitu memiliki teman baru yang berasal dari berbagai kelurahan, sehingga menjadi lebih aktif untuk berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan rumah. Hal ini membuktikan bahwa tanpa disadari kemampuan komunikasi individu ikut meningkat seiring mampunya mereka dalam menjalin relasi dan berperan dalam kegiatan lingkungan. Aspek lain yang unggul yakni kontrol rumah tangga dalam mengambil keputusan terhadap bagian rumah yang diperbaiki. Aspek ini menunjukkan adanya pengaruh yang kuat dari rumah tangga dalam mengambil keputusan dan juga pengetahuan yang berkaitan dengan pentingnya perbaikan pada bagian rumah tertentu.



Gambar 5 Grafik Aspek Berdasarkan Pembobotan



Gambar 6 Diagram Implementasi Gender

Beberapa hasil analisis diatas apabila dibuat diagram keterhubungan, seperti Gambar 6, menunjukkan bahwa penerapan aspek gender telah berhasil diintegrasikan melalui peran yang diberikan oleh rumah tangga penerima bantuan, khususnya aspek manfaat dan kontrol. Peningkatan kapasitas individu ini dibuktikan dari terbentuknya kesadaran pengetahuan dari keluarga, yang merupakan dampak dari terjalannya relasi kolektif antar penerima bantuan. Ini mengkonfirmasi hubungan prasyarat pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan pengarusutamaan gender dan pembangunan kota inklusif.

## KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian untuk menganalisis penerapan gender pada pelaksanaan peningkatan kualitas hunian program BSPS, dapat disimpulkan bahwa aspek gender sudah diterapkan dengan cukup baik. Keberhasilan penerapan ini dibuktikan dari adanya peran yang diberikan rumah tangga selama berlangsungnya kegiatan dan manfaat yang dirasakan oleh individu. Dari 4 variabel pengarusutamaan gender, ditemukan bahwa hanya 2 aspek, yaitu manfaat dan kontrol, sebesar 74,74 dan kontrol sebesar 67,17, yang menjadi kunci keberhasilan penerapan pengarusutamaan gender pada kegiatan BSPS Kota Semarang. Keberhasilan penerapan aspek gender ini memberikan pengaruh pada meningkatnya kapasitas rumah tangga penerima bantuan secara individu.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Pertama, perlu adanya peningkatan manfaat dari terjalannya relasi, seperti manfaat berupa adanya bantuan tenaga kerja. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah pemahaman tenaga fasilitator lapangan mengenai pengetahuan yang berkaitan dengan gender maupun pembangunan yang responsif gender, sehingga program tersebut dapat terlaksana tepat sasaran sesuai dengan tujuan program. Terakhir yang perlu diperhatikan yaitu upaya atau metode berbasis komunitas untuk meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat selama pelaksanaan program.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini dibiayai dengan Dana Hibah Penelitian Strategis Departemen dari Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2020.

## DAFTAR PUSTAKA

[Inpres] Instruksi Presiden. 2000. *Instruksi Presiden*

*Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.*

- [Permen PUPR]. 2016. *Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.*
- Asian Development Bank. 2000. *Daftar Periksa (Checklist) Gender.* Vol. 1.
- Babaei, Hamidreza, Nobaya Ahmad, dan Sarjit S. Gill. 2012. "Bonding, Bridging and Linking Social Capital and Empowerment Among Squatter Settlements in Tehran, Iran." *World Applied Sciences Journal* 17 (1): 119-26.
- Bappenas. 2012. *Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender.*
- Bardhan, Ronita, Minna Sunikka-Blank, dan Anika Nasra Haque. 2019. "Sentiment Analysis as Tool for Gender Mainstreaming in Slum Rehabilitation Housing Management in Mumbai, India." *Habitat International* 92 (October): 102040.  
<https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2019.102040>.
- Belsky, Eric S. 2012. "Planning for Inclusive and Sustainable Urban Development." *State of the World 2012: Moving Toward Sustainable Prosperity*, 38-52.
- Bradshaw, Sarah, Sylvia Chant, dan Brian Linneker. 2017. "Gender and Poverty: What We Know, Don't Know, and Need to Know for Agenda 2030." *Gender, Place and Culture* 24 (12): 1667-88.
- Burns, Justine, Malcolm Keswell, dan Murray Leibbrandt. 2005. "Social Assistance, Gender, and the Aged in South Africa." *Feminist Economics* 11 (2): 103-15.
- Cage, Caroline. 2014. "Transforming the Social Capital of the Urban Poor: Lessons from Kisumu, Kenya." *Development in Practice* 24 (1): 3-17.
- Caro, Deborah, Jane Schueller, M Ramsey, dan W Voet. 2009. *A Manual for Integrating Gender Into Reproductive Health and HIV Programs: From Commitment to action.* U.S. Agency for International Development and Interagency Gender Working Group.
- Chen, Martha Alter, Joann Vanek, dan Marilyn Carr. 2004. *Mainstreaming Informal Employment and Gender in Poverty Reduction: A Handbook for Policy-Makers and Other Stakeholders.* Commonwealth Secretariat.
- Cherunya, Pauline C., Bernhard Truffer, Edinah Moraa Samuel, dan Christoph Lüthi. 2020. "The Challenges of Livelihoods Reconstruction in the Context of Informal Settlement Upgrading." *Environment and Planning A* 0 (0): 1-23.
- Czischke, Darinka. 2018. "Collaborative Housing and

- Housing Providers: Towards an Analytical Framework of Multi-Stakeholder Collaboration in Housing Co-Production." *International Journal of Housing Policy* 18 (1): 55–81.
- Esariti, Landung, Lillah Haulah, dan S Sunarti. 2019. "Pengaruhutamaan Gender dalam Program Gerbang Hebat Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kota Semarang." *TATALOKA* 21 (1): 140–52.  
<https://doi.org/10.14710/tataloka.21.1.140-152>.
- Fenster, Tovi. 1993. "Settlement Planning and Participation under Principles of Pluralism." *Progress in Planning* 39: 167–242.
- Gwaleba, Method J., dan Fahria Masum. 2018. "Participation of Informal Settlers in Participatory Land Use Planning Project in Pursuit of Tenure Security." *Urban Forum* 29 (2): 169–84.
- Ibrahim, Solava, dan Sabina Alkire. 2007. "Agency and Empowerment: A Proposal for Internationally Comparable Indicators." *Oxford Development Studies* 35 (4): 379–403.
- Jiboye, Adesoji David. 2011. "Achieving Sustainable Housing Development in Nigeria: A Critical Challenge to Governance." *International Journal of Humanities and Social Science* 1 (9): 121–27.
- Meier, Petra, dan Emanuela Lombardo. 2013. "Gender Quotas, Gender Mainstreaming and Gender Relations in Politics." *Political Science* 65 (1): 46–62.
- Moksnes, Heidi, dan Mia Melin. 2014. *Claiming the City Civil Society Mobilisation by the Urban Poor*. Uppsala Universitet. <http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:728108/FULLTEXT03.pdf>.
- Moser, Caroline O.N. 2017. "Gender Transformation in a New Global Urban Agenda: Challenges for Habitat III and Beyond." *Environment and Urbanization* 29 (1): 221–36.  
<https://doi.org/10.1177/0956247816662573>.
- Mussardo, Giuseppe. 2019. *Panduan Cara Pemberian Skor dan Analisis untuk Menilai Kesejahteraan Manusia. Statistical Field Theor.* Vol. 53.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Narayan, Deepa. 2005. *Measuring empowerment: cross-disciplinary perspectives. Progress in Development Studies*. World Bank Publications.
- Parsell, Cameron. 2012. "Home is Where the House is: The Meaning of Home for People Sleeping Rough." *Housing Studies* 27 (2): 159–73.
- Puspitawati, Herien. 2013. "Konsep, Teori dan Analisis Gender." *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia.*, 1–13.
- Rahman, Mohammed Mahbubur. 2016. "Sustainability of Slum Improvement Program in Bangladesh: An Approach of Capacity Building, Community Participation and Empowerment." *Journal of Bangladesh Institute of Planners* 8 (December): 59–72.
- Siddique, M. A.B. 1998. "Gender Issues in Poverty Alleviation: A Case Study of Bangladesh." *International Journal of Social Economics* 25 (6/7/8): 1095–1111.
- Sugarda, Chandra. 2012. *Penyusunan Gender Analysis Pathway ( Gap ) Gender Budget Statement (Gbs)*.
- Suhaeti, Rita Nur dan Edi Basuno. 2006. "Integrasi Gender dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat Pesisir." *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 6 (1): 1–23.
- Tan, Teck Hong. 2012. "Meeting first-time buyers' housing needs and preferences in greater Kuala Lumpur." *Cities* 29 (6): 389–96.  
<https://doi.org/10.1016/j.cities.2011.11.016>.
- Tunas, Devisari, dan Andrea Peresthu. 2010. "The Self-help Housing in Indonesia: The Only Option for The Poor?" *Habitat International* 34 (3): 315–22.
- Zuckerman, Elaine. 2002. "Poverty Reduction Strategy Papers and Gender." In *Background Paper for the Conference on Sustainable Poverty Reduction and PRSPs-Challenges for Developing Countries and Development Cooperation, Berlin*, 1–12.
- Zulkarnain. 2016. "Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Parigi Selatan." *Katalogis* 4 (10): 179–88.